

PERSPEKTIF PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PONDOK PESANTREN DI WILAYAH MADURA

Oleh :
Drs. Ec. Fatchurrochim Ghany, MT

Abstrak

Pengembangan sumber daya manusia pada suatu wilayah seperti Pulau Madura tidak akan terlepas dari peranan pondok pesantren dan dukungan masyarakat, baik masyarakat sekitar, wali santri, alumni, maupun simpatisan lainnya. Masyarakat sekitar bisa menjadi indikator. Makin erat relasi sosialnya atau guyubnya pesantren dengan masyarakat sekitar, maka pesantren itu bisa dikatakan mendapat dukungan penuh dari masyarakat. Pondok pesantren tumbuh dan berkembang di masyarakat mengikuti tuntutan dan dinamika lingkungannya. Artinya, kegiatan pengembangan yang dilakukan pesantren merupakan suatu keharusan agar pesantren dapat terus eksis dalam masyarakat yang berkembang secara dinamis.

Kata kunci : sumber daya manusia, pendidikan, pondok pesantren.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan aspek terpenting dalam upaya pengembangan sumber daya manusia, oleh sebab itu perlu dilakukan evaluasi terhadap program pendidikan yang telah dilaksanakan guna menemukan solusi dalam bentuk kebijakan pengembangan di masa mendatang. Meski selama ini telah dilakukan berbagai upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan, antara lain meliputi penyempurnaan kurikulum, pengadaan buku ajar, peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan, pengadaan fasilitas pendidikan seperti perpustakaan, laboratorium, serta perbaikan dan peningkatan manajemen pendidikan, namun berbagai indikator menunjukkan mutu pendidikan masih belum meningkat secara signifikan. Menurut laporan United Nation Development Program tentang *human development index* (HDI) menyatakan di antara 174 negara, Indonesia merosot dari urutan ke-105 pada tahun 1998 menjadi ke-109 pada tahun 1999, bahkan berada di bawah Vietnam.

Salah satu indikatornya adalah tingginya angka *drop-out* pendidikan di Indonesia, yang sangat berkaitan dengan jumlah penduduknya yang besar. Untuk tahun 2001, dari sekitar 38,4 juta anak yang terdaftar di Sekolah Dasar dan Madrasah, hanya 9,4 juta yang masuk ke Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, 5,6 juta kemudian masuk ke Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan akhirnya hanya sekitar 1,6 juta yang bisa meneruskan ke Perguruan Tinggi. Angka ini tentu belum

termasuk mereka yang kemudian *drop-out* di tengah jalan.

Di sisi lain, lulusan pendidikan pada semua tingkatan dan mereka yang *drop-out* sebagian besar tidak mampu diserap oleh lapangan kerja yang ada, sehingga angka pengangguran mereka yang berpendidikan cenderung terus membengkak. Salah satu penyebabnya adalah karena para lulusan atau mereka yang *drop-out* tadi tidak memiliki ketrampilan (*skill*) memadai yang dibutuhkan oleh lapangan kerja yang tersedia. Sementara mereka enggan menekuni kesempatan kerja dan berusaha yang masih cukup besar di daerah pedesaan dan selanjutnya bahkan mendorong tingginya laju urbanisasi.

Dibandingkan dengan wilayah Propinsi Jawa Timur pada umumnya, kondisi sumber daya manusia di wilayah Madura ditinjau dari aspek mutu pendidikan lebih memprihatinkan, terutama karena faktor ekonomi, sosial dan budaya yang kurang mendukung terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan. Keterbelakangan ekonomi telah mendorong penduduk usia sekolah memasuki lapangan kerja, yang artinya meningkatkan angka *drop-out* pendidikan. Bagi sebagian besar masyarakat yang status ekonominya lemah, seorang anak dipandang cukup baca tulis, lalu mencari kerja. Pada sisi lain, karena faktor ekonomi, sosial dan budaya tadi, sebagian masyarakat di wilayah Madura lebih memilih lembaga pondok pesantren sebagai tempat pendidikan anak-anaknya.

Kondisi tersebut semakin memprihatinkan ketika pondok pesantren sebagai salah satu lembaga pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia terpenting di wilayah Madura, belum banyak berubah dari paradigma awal yang lebih berfokus pada pendidikan agama. Padahal di era globalisasi dengan persaingan yang semakin ketat dewasa ini, membangun sumber daya manusia tidak semata-mata cukup dengan membentuk budi pekerti saja, melainkan diperlukan pula berbagai pengetahuan dan ketrampilan (*skill*) yang selama ini masih kurang mampu dipenuhi oleh pondok pesantren, karena berbagai faktor. Akibatnya, lulusan maupun mereka yang *drop-out* dari pondok pesantren tidak dapat bersaing dalam kehidupan yang semakin kompetitif, karena kurang memiliki ketrampilan (*skill*) yang justru merupakan tuntutan dan kebutuhan pasar dewasa ini.

Sejalan dengan rencana pengembangan industri di wilayah Madura mengiringi pembangunan Jembatan Suramadu sebagai sebuah model pembangunan yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi, dengan kondisi kualitas sumber daya manusia di wilayah Madura seperti ini dapat menimbulkan kesenjangan sosial, pengangguran massal sumber daya manusia lokal, yang pada gilirannya dapat memicu timbulnya konflik sosial yang meluas dan intensif. Dalam model pembangunan seperti itu, bisa dipastikan masyarakat Madura cenderung hanya menjadi penonton, jika sumber daya manusianya tidak memiliki

keahlian yang diperlukan dalam model pembangunan tersebut, yaitu keahlian teknologi dan manajemen yang jauh lebih canggih (*sophisticated*).

Mengantisipasi hal tersebut, serta sesuai dengan salah satu butir yang disarankan oleh BASSRA (Badan Silaturahmi Ulama Pesantren Madura), bahwa mempersiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia di wilayah Madura menjadi suatu keniscayaan. Mengingat pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia terpenting dan paling memasyarakat, maka perhatian pada upaya peningkatan dan pengembangan kualitas pondok pesantren menjadi prioritas utama.

Apalagi pondok pesantren sebagai institusi pendidikan (agama) memiliki beberapa kelebihan dari pendidikan sekolah umum yang ada di wilayah Madura, antara lain : *Pertama*, penyelenggaraan pendidikan pondok pesantren dalam bentuk asrama memungkinkan para santri untuk belajar disiplin, menjalin kebersamaan, tenggang rasa, toleran, kemandirian, dan kesederhanaan atau lebih tepatnya belajar prihatin karena semua fasilitasnya amat terbatas.

Kedua, dengan belajar di pondok pesantren selain memperoleh pendidikan agama dan budi pekerti, juga memperoleh pendidikan umum, meski pun kadarnya masih amat minim jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum.

Ketiga, di pondok pesantren diajarkan beberapa ketrampilan sebagai bekal hidup mandiri, meski belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang sedang berubah serta model pembangunan ekonomi yang disebutkan di muka. Dengan demikian, para lulusan pondok pesantren maupun mereka yang *drop-out* lebih mandiri ketika kembali ke lingkungan masyarakatnya.

Keempat, sistem yang dikembangkan pondok pesantren lebih memungkinkan para santri berkompetisi secara realistis, bukan saja dalam soal prestasi belajar tapi juga prestasi dalam berusaha dan bekerja. Pengembangan sikap egalitarian di kalangan para santri merupakan ciri dan kelebihan pondok pesantren.

Kelima, pondok pesantren menciptakan ikatan persaudaraan di antara para santri tanpa paksaan, dengan jangkauannya yang luas dan panjang menjadi modal dasar terpenting dalam membangun masyarakat madani (*civil society*).

Keenam, sistem pondok memungkinkan tumbuhnya semangat belajar tanpa henti di kalangan para santri, yang belajar dengan sadar bagi perbaikan dirinya, sehingga mereka belajar agar senantiasa mampu mengatasi persoalan-persoalan hidupnya.

Hanya saja, selama ini berkembang anggapan bahwa pondok pesantren cenderung tidak dinamis dan tertutup terhadap segala perubahan atau modernisasi. Anggapan ini pula yang menyebabkan

lembaga pendidikan pondok pesantren (terutama yang tidak memiliki madrasah) diidentikkan dengan tradisionalisme, dan tidak sejalan dengan proses modernisasi. Akibatnya, perhatian pada pengembangan pondok pesantren lebih dilihat dalam perspektif kesediaannya menjadi lembaga pendidikan umum.

Padahal sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa pondok pesantren terkenal, pondok pesantren sesungguhnya sangat respek terhadap perubahan dan atau modernisasi, namun dengan syarat tidak merusak tradisi yang selama ini menjadi kelebihan dan kekuatan lembaga pondok pesantren. Pondok pesantren memegang prinsip dasar dalam menyikapi perubahan sebagai berikut: "*Al-muhaafadzatu al-Qadiimi as-Shaalihi wal-Akhidzu bil-Jadidil Ashlah*" (memegang tradisi lama yang baik dan mengambil inovasi baru yang lebih baik).

Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di depan, maka masalah penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Apa yang menjadi permasalahan dalam pengembangan sistem pendidikan pondok pesantren di wilayah Madura selama ini, sehingga para lulusan dan drop-outnya belum mampu bersaing dengan lulusan pendidikan lainnya ?
- b. Bagaimana mengembangkan sistem pendidikan pondok pesantren untuk mengantisipasi perubahan sosial dan menyongsong rencana industrialisasi di wilayah Madura?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Mengidentifikasi sistem pendidikan pondok pesantren di wilayah Madura dan mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam upaya pengembangan sumber daya manusia untuk mengantisipasi rencana industrialisasi dan perubahan sosial di masa mendatang.
- b. Menemukan model pengembangan sistem pendidikan pondok pesantren yang inovatif, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di wilayah Madura.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk :

- a. Memberikan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas anak didik dan atau out put pendidikan pesantren di wilayah Madura, sehingga mampu berkompetisi di era globalisasi yang tingkat persaingannya semakin ketat dan keras.
- b. Merumuskan rekomendasi kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten di wilayah Madura dalam upaya

mengembangkan model sistem pendidikan pesantren yang inovatif sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pengembangan sumber daya manusia di wilayah Madura.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka model penelitian ini adalah penelitian yang berbasis analisis kebijakan, dimana analisis kebijakan merupakan studi yang bersifat deskriptif analitis. Pengembangan sumber daya manusia di wilayah Madura melalui sistem pendidikan pesantren dianalisis melalui pendekatan *multistakeholders*, dengan tetap menggunakan pendekatan sistem. Proses analisis dilakukan dari serangkaian *input-input* dari *multistakeholders*, lalu melalui metode *brain-storming* dan *focus discussion group* disepakati dan dirumuskan konsep kebijakan yang paling efektif dengan kondisi riil di wilayah Madura dewasa ini, dan sekaligus merupakan *out-put*.

Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan sistem pendidikan pesantren di wilayah Madura selama ini yang meliputi karakteristik dan dinamika serta budaya pesantren-pesantren, urgensinya dalam pengembangan sistem pendidikan pesantren yang meliputi kurikulum dan manajemennya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah gabungan beberapa cara/teknik, yaitu dokumentasi (data sekunder), kuesioner dan wawancara (data primer), serta *focus group discussion*.

Teknik Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan kerangka fikir sistem. Adapun penggunaan analisis statistik dimungkinkan sebagai pelengkap atau sebagai data/informasi pendukung bagi analisis kebijakan guna menghasilkan konsep kebijakan yang demokratis.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di seluruh kabupaten di wilayah Madura, yaitu Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

HASIL PENELITIAN

Pondok Pesantren di wilayah Madura

Berdasarkan data sekunder yang didapat dari Departemen Agama R.I. (2005), terlihat bahwa tipe pondok pesantren yang ada di

wilayah Madura sebagian besar mengelola pendidikan dalam bentuk kombinasi antara salafiyah dengan khalafiyah (64,9 %), status penyelenggaraan pondok pesantren mayoritas dikelola yayasan (57,2). Induk organisasi pondok pesantren terbesar diluar RMI, BKSPPI, dan IKMP (54,5 %). Sebagian besar lokasi pondok pesantren berada di Desa (83,4 %). Usia rata-rata kyai/pimpinan pondok pesantren sekitar usia 30-49 Tahun (55,4 %). Jenis kelamin kyai/pimpinan pondok pesantren terbesar laki-laki (57,8 %). Pendidikan terakhir kyai/pimpinan pondok pesantren terbanyak Madrasah Ibtidaiyah sampai Sekolah Menengah Umum (77,4 %). Adapun usia rata-rata ustadz/guru terbanyak kurang dari 30 tahun (58,2 %). Jenis kelamin ustadz/guru terbanyak laki-laki (70,3 %). Rasio ustadz dan santri adalah 1:20. Jumlah santri menurut jenis kelamin terbesar laki-laki (55 %). Status santri terbesar adalah santri murni sebesar 63,5 %.

Berdasarkan sample pondok pesantren yang telah ditentukan, ternyata telah banyak perkembangan yang terjadi di Pondok Pesantren, hal ini dapat terlihat pada hasil survey yang telah dilakukan, bahwa jenis lembaga pendidikan yang dikelola Pondok Pesantren pada tahun-tahun sebelumnya sebagian besar hanya mengelola jenis pendidikan Salafiyah dan Madrasah Diniyah, namun pada hasil survey yang dilakukan pada bulan Oktober 2002 ternyata telah banyak berubah menjadi madrasah umum yang muatan kurikulumnya menggunakan kurikulum Departemen Agama. Perubahan ini terlihat pada hasil survey yaitu pada tahun-tahun sebelumnya sebagian besar Pondok Pesantren mengelola jenis pendidikan Madrasah Diniyah dan Madrasah Salafiyah (sebanyak 28,3 %), sekarang berubah (sebanyak 11,0 %), selanjutnya Pondok Pesantren yang pada tahun-tahun sebelumnya sedikit yang mengelola jenis pendidikan Madrasah Umum, Madrasah Diniyah dan Salafiyah (sebanyak 16,3 %) sekarang berubah menjadi sebanyak (40,2 %).

Lembaga Pendidikan di wilayah Madura

Pembahasan tentang kondisi pendidikan di wilayah Madura perlu dibedakan secara jelas dan terpisahkan (*clear and distingue*) agar tidak menyedatkan. Hal itu disebabkan ada perbedaan yang cukup signifikan antara kondisi pendidikan di desa dengan di kota atau antara wilayah utara dengan tengah dan selatan. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kondisi geografis, ekonomi, politik, dan sosial. Secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi pendidikan di perkotaan atau wilayah tengah serta selatan jauh lebih baik dibandingkan dengan daerah pedesaan dan atau daerah utara.

Kondisi pendidikan di wilayah perkotaan, boleh dikatakan tidak jauh berbeda dengan kondisi pendidikan masyarakat di kota-kota di Jawa. Angka partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya cukup tinggi, prasarana dan sarana memadai,

atau daerah utara.

Kondisi pendidikan di wilayah perkotaan, boleh dikatakan tidak jauh berbeda dengan kondisi pendidikan masyarakat di kota-kota di Jawa. Angka partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya cukup tinggi, prasarana dan sarana memadai, guru memenuhi syarat (baik kuantitas maupun kualitas), kegiatan belajar mengajar berjalan normal (sesuai dengan jadwal pelajaran), dan hasil akhir yang baik (dengan ditunjukkan oleh tingginya nilai ebtanas murni). Dengan kata lain, kondisi pendidikan di wilayah perkotaan boleh dikatakan relatif tidak ada masalah.

Sedangkan kondisi pendidikan di wilayah pedesaan, terlebih di wilayah bagian utara terasa sangat kontradiktif dengan di wilayah perkotaan. Pada umumnya kondisi pendidikan di wilayah pedesaan bagian utara itu adalah prasarana dan sarananya jelek (gedung dan mebeler rusak, tidak ada perpustakaan, ruang guru, dan lainnya); kekurangan guru; kegiatan belajar mengajar kurang optimal (tidak sesuai jadwal); dan tingkat kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anaknya masih rendah. Semuanya itu kemudian berdampak pada buruknya kinerja pendidikan di wilayah Madura, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.

Pulau Madura dikenal sebagai pulau seribu santri, karena di sana terdapat ratusan pondok pesantren dengan puluhan ribu santrinya. Banyaknya pondok pesantren ini sekaligus berdampak pada beragamnya institusi pendidikan di wilayah Madura. Bila di Jawa pada umumnya hanya mengenal dua jenis institusi pendidikan, yaitu pendidikan nasional yang berafiliasi ke Departemen Pendidikan Nasional dan pendidikan agama yang berafiliasi ke Departemen Agama, maka di wilayah Madura dijumpai sekurang-kurangnya terdapat 4 (empat) jenis institusi pendidikan, yaitu:

1. Pendidikan Umum, terdiri dari Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Umum, Sekolah
2. Pendidikan Madrasah, terdiri dari Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Kejuruan, dan Perguruan Tinggi Agama Islam.
3. Madrasah Diniyah, terdiri dari Taman Pendidikan Al Qur'an, Madrasah Awwaliyah, Madrasah Wustha, dan Madrasah Ulya.
4. Pondok Pesantren, terdiri dari pondok pesantren tradisional (salafiyah/non klasikal dan diniyah/klasikal) dan Modern (madrasah umum pendidikan umum).

Permasalahan Pendidikan Pondok Pesantren

Permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam penyelenggaraan

pendidikan pondok pesantren adalah sebagai berikut:

- a. Aspek Kelembagaan
Masih banyak pondok pesantren yang belum berbadan hukum, atau pengelolaannya masih secara individu, sehingga kesulitan dalam melakukan kerjasama dengan pihak luar.
- b. Aspek Kurikulum
Kurikulum pendidikan di pondok pesantren masih terfokus pada pendidikan agama dengan sedikit penekanan pada ilmu pengetahuan umum dan teknologi, sehingga lulusannya belum mampu berkompetisi dengan lulusan lembaga pendidikan lainnya dalam dunia kerja.
- c. Aspek Sarana prasarana Umumnya pondok pesantren belum memiliki ruang kelas, perpustakaan, laboratorium dan ruang keterampilan yang cukup memadai untuk sebuah institusi pendidikan yang mengharapkan lulusannya dapat berprestasi.
- d. Aspek Budaya
Budaya paternalistik, dimana figur pimpinan dijadikan sebagai panutan tunggal tanpa reserve, terbawa dalam pengelolaan pendidikan dimana anak didik akan merasa 'sungkan' dan bahkan cenderung takut dalam mengemukakan ide-ide dan pendapatnya sehingga dapat menghambat proses kreativitas mereka.
- e. Aspek Manajemen
Banyak pesantren yang masih dikelola secara informal yang didasarkan pada asumsi bahwa pesantren sebagai lembaga tradisional tidaklah memerlukan legalitas formal, disebabkan oleh kebesaran pengaruh seorang kyai sebagai figur sentral yang dikagumi dan dipanuti, sehingga aspek-aspek manajemen modern masih belum sepenuhnya dilaksanakan.
- f. Aspek Pendanaan
Faktor dana atau kebutuhan finansial pesantren, sebagian besar masih dipenuhi oleh pimpinan maupun pengelola pondok, sehingga cukup menjadi faktor pembatas dalam pengembangannya di masa mendatang.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, secara filosofis inovasi pendidikan pesantren tidak mungkin datang dengan sendirinya, tetapi secara mutlak harus diupayakan. Dalam konteks ini, salah satu faktor yang sangat penting adalah peran kiai/pimpinan pondok pesantren, mengingat dalam sub kultur pesantren menghendaki kiai sebagai pengasuh, pemimpin bahkan sekaligus pemilik pesantren. Dengan kata lain, kedudukan kiai menjadi kunci

utama dalam upaya inovasi pendidikan pondok pesantren.

Kedua, ada kecenderungan sikap resistensi para kiai terhadap upaya pengembangan yang datang dari luar dan belum jelas formatnya. Sikap resistensi ini dalam kenyataannya bukan karena menolak pengembangan dan atau pembaruan pesantren, tetapi lebih karena faktor substansi pengembangan dan atau pembaruan yang ditawarkan. Ada kaidah yang sudah mendarah daging dan menjadi kultur pesantren yang tidak dapat diabaikan dalam inovasi pendidikan pesantren, yaitu: *Melestarikan nilai-nilai lama yang baik dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik*. Kalau memang secara makro pondok pesantren diharapkan dapat berperan aktif dan memberi kontribusi yang berbobot di dalam *social engineering* dan transformasi sosial kultural, maka ia harus memiliki ciri-ciri khusus tertentu, yakni ciri pembaruan, meski pun demikian ciri-ciri lama yang masih relevan harus dipertahankan.

Ketiga, dimensi kultural dalam hal ini watak mandiri merupakan ciri kultural yang harus dipertahankan meskipun harus dijaga agar tidak berkembang ke arah pengucilan diri, *isolasionisme*. Karena itu, solidaritas spontan dan tak terarah perlu ditingkatkan menjadi solidaritas yang terorganisir dalam suatu hubungan akademis yang fungsional antar pesantren. Watak sederhana perlu dipertahankan karena sangat diperlukan masyarakat yang memerlukan pemupukan modal untuk pembangunan, tanpa perlu menjurus ke arah peningkatan yang berlebihan terhadap kehidupan duniawi.

Keempat, dimensi edukatif, antara lain meliputi *out-put* pendidikan, secara tradisional proses pendidikan di pondok pesantren menghasilkan pimpinan keagamaan (*religious leader*) atau setidaknya *religious people* yang berorientasi pada masyarakat setempat.

Kelima, dimensi sosial, di mana pesantren dapat dikembangkan menjadi lembaga pusat kegiatan belajar masyarakat, yang berfungsi menyampaikan teknologi baru yang cocok bagi masyarakat setempat serta memberikan pelayanan sosial dan keagamaan. Dengan demikian, terciptalah hubungan timbal-balik antara masyarakat dan pesantren yang bersifat *simbiose mutualistis*.

Keenam, ada tiga *output* yang dapat menjadi target pendidikan pondok pesantren:

1. *Religious skillful people*, yang akan menjadi tenaga-tenaga trampil tetapi sekaligus mempunyai iman yang teguh dan utuh baik dalam sikap dan perilaku, yang akan mengisi kebutuhan tenaga di dalam berbagai sektor pembangunan.
2. *Religious community leader*, yang akan menjadi penggerak yang dinamis di dalam proses transformasi sosial kultural dan sekaligus menjadi penjaga gawang terhadap akses pembangunan dan mampu membawa inspirasi masyarakat terutama golongan lemah.

3. *Religious intellectual*, yang mempunyai integrasi kokoh serta cakap melakukan analisa ilmiah dan *concern* terhadap masalah sosial.

Ketujuh, untuk mengembangkan watak mandiri, sederhana, solidaritas yang terorganisasikan, inovasi, demokratis, luwes secara struktural dan berorientasi global, maka perlu dilakukan program intervensi, dalam bentuk program penyadaran sosial dengan sasaran utama adalah kiai/pimpinan pondok pesantren, para pengasuh, ustadz dan para santri.

Kedelapan, untuk meningkatkan hasil pendidikan pondok pesantren dapat dilakukan melalui usaha-usaha standarisasi, program terminal dan spesialisasi, yang selanjutnya dapat dijadikan landasan bagi pengembangan ke arah: pesantren dasar, pesantren lanjutan dan bahkan pesantren tingkat tinggi.

Kesembilan, pengembangan pendidikan pondok pesantren perlu ditekankan pada pengembangan kurikulum baik pengetahuan umum, ketrampilan dan usaha-usaha produktif yang berorientasi pada *life skill education*, yang selama ini menjadi salah satu kelemahan sistem pendidikan di pondok pesantren.

Kesepuluh, dalam konteks pengembangan tersebut salah satu faktor utama yang sangat kuat pengaruhnya adalah sarana prasarana penunjang kegiatan kependidikan di lingkungan pondok pesantren seperti perpustakaan, laboratorium, dan muatan kurikulum yang bersifat praktck, di samping kondisi ekonomi lokal yang tidak bisa terlepas dari kondisi ekonomi nasional dan global.

Rekomendasi

Rekomendasi yang dapat disampaikan berdasarkan simpulan-simpulan sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Perlu dirumuskan kebijakan dan implementasi kebijakan pengembangan pondok pesantren di wilayah Madura yang bersifat komprehensif dan berjalan simultan dari seluruh *stakeholders* secara dinamis dan partisipatif. Dalam konteks ini, secara khusus perlu dilakukan pendekatan khusus kepada para kiai/pimpinan pondok pesantren.
2. Mengingat sistem pendidikan di lingkungan pondok pesantren di wilayah Madura sangat bervariasi baik model maupun jenisnya, maka perlakuan pengembangannya tidak dilakukan secara seragam, tapi harus disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pondok pesantren serta daerah dan lingkungan masyarakat di sekitarnya.
3. Diperlukan adanya studi pengembangan model (spesifik) kurikulum pondok pesantren yang lebih moderat, dengan memberikan muatan atau bekal pengetahuan yang bersifat

3. Diperlukan adanya studi pengembangan model (spesifik) kurikulum pondok pesantren yang lebih moderat, dengan memberikan muatan atau bekal pengetahuan yang bersifat praktek ketrampilan maupun magang (*life skill education*) bagi usaha-usaha produktif.
4. Pondok pesantren harus mendapat perlakuan yang sama dalam hal bantuan fasilitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan kependidikan seperti perpustakaan, laboratorium, dan muatan kurikulum yang bersifat praktek. Pembinaan (termasuk perhatian) tidak bisa lagi hanya dilakukan oleh Departemen Agama, tapi juga oleh Departemen Pendidikan Nasional, pemerintah daerah maupun *stakeholders* lainnya.

PENYIMPULAN

Latar Belakang

Perencanaan pendidikan nasional adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan penyelenggaraan pendidikan di suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan dihasilkan. Perencanaan pendidikan nasional merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan penyelenggaraan pendidikan di suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan dihasilkan. Perencanaan pendidikan nasional merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan penyelenggaraan pendidikan di suatu negara dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan dihasilkan.